

MEMAHAMI STRUKTUR MASYARAKAT INDONESIA

oleh Sigit Pranawa

ABSTRACT

Social structure in Indonesia have two unique characteristics. Horizontal characteristics can be seen in social based on ethic, religion, cultural and regional differences. While the vertical characteristics can be seen in stratification differences. That differences in ethic, religion, cultural and regional forms the characteristics of plural society. And the characteristics of plural society will be complex when vertical dimention because of social polarization based of political and economic power.

Key words: Social structure, plural society.

Pendahuluan

Tidak ada satupun bangsa di dunia ini yang bercorak monokultur, mono-religion, monoetnik. Umat manusia sudah begitu tersebar dan berbaur sehingga dunia ini bukan lagi milik golongan atau kelompok tertentu (Chang, 1999). Dilihat dari segi etnis, bahasa, agama dan sebagainya, Indonesia termasuk salah satu negara yang paling majemuk di dunia (Abdillah, 1999).

Kemajemukan masyarakat Indonesia terjadi oleh adanya

beberapa faktor (Nasikun, 1987:38-44). *Pertama*, keadaan geografis yang membagi wilayah Indonesia atas kurang lebih 3.000 pulau yang terserak di suatu daerah equator sepanjang kurang lebih 3.000 mil dari timur ke barat dan lebih dari 1.000 mil dari utara ke selatan. Ini merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap terciptanya pluralistis suku bangsa Indonesia. *Kedua*, yakni kenyataan bahwa Indonesia terletak di antara samudra Indonesia dan samudra Pasific. Kenyataan letak yang

demikian ini sangat mempengaruhi terciptanya pluralitas agama di dalam masyarakat melalui pengaruh kebudayaan bangsa lain yang menyentuh masyarakat Indonesia.

Ketiga, iklim dan struktur tanah yang berbeda di antara berbagai daerah di kepulauan ini, merupakan faktor yang menciptakan pluralitas regional di Indonesia.

Perbedaan curah hujan dan kesuburan tanah merupakan kondisi yang menciptakan lingkungan ekologis yang berbeda yakni daerah pertanian sawah (*wet rice cultivation*) serta pertanian ladang (*shifting cultivation*). Perbedaan lingkungan ekologis menjadi sebab bagi terjadinya kontras antara Jawa dan luar Jawa di dalam bidang kependudukan, ekonomi, sosial dan budaya. Tulisan ini bermaksud membahas kemajemukan etnis, agama dan ekonomi yang terdapat dalam masyarakat Indonesia tersebut.

Pembahasan

Istilah masyarakat majemuk lebih jarang digunakan apabila dibandingkan dengan istilah masyarakat pluralistik yang berasal dari kata *pluralism*. Secara tradisional istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan suatu sistem politik tertentu yang diperlukan di dalam negara yang kompleks untuk menerapkan demokrasi. Adanya demokrasi ditandai dengan pembagian kekuasaan untuk membuat kebijakan-kebijakan

yang efektif, antara golongan-golongan tertentu di dalam masyarakat, dengan maksud mengadakan kompetisi yang sehat. Lama kelamaan istilah tersebut diterapkan terhadap masyarakat-masyarakat yang mencakup aneka ragam suku bangsa (*ethnic-group*) yang masing-masing mempunyai kebudayaan khusus (*sub-culture*). Suku bangsa itu sendiri merupakan kesatuan-kesatuan manusia yang sangat terikat oleh kesadaran akan kesatuan sistem sosial dan kebudayaan (yang tidak jarang didukung oleh adanya bahasa tertentu di kalangan suku bangsa tersebut) (Soekanto, 1993:48).

Dari uraian Furnivall, Nasikun (1987) menyimpulkan bahwa, masyarakat majemuk (*plural societies*), adalah suatu masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain di dalam kesatuan politik. Sistem nilai yang dianut oleh berbagai kesatuan sosial yang menjadi bagian-bagiannya adalah sedemikian rupa sehingga para anggota masyarakat kurang memiliki loyalitas terhadap masyarakat sebagai keseluruhan, kurang memiliki homogenitas kebudayaan atau bahkan kurang memiliki dasar-dasar untuk saling memahami satu sama lain.

Suatu masyarakat adalah bersifat majemuk sejauh masyarakat tersebut secara struktural memiliki sub-sub kebudayaan yang bersifat *diverse*. Masyarakat yang demikian ditandai

oleh kurang berkembangnya sistem nilai atau konsensus yang disepakati oleh seluruh anggota masyarakat, oleh berkembangnya sistem nilai dari kesatuan-kesatuan sosial yang menjadi bagian-bagiannya dengan penganutan para anggotanya masing-masing secara tegar dalam bentuknya yang relatif murni, serta oleh sering timbulnya konflik-konflik sosial, atau setidak-tidaknya oleh kurangnya integrasi dan saling ketergantungan di antara kesatuan-kesatuan sosial yang menjadi bagian-bagiannya.

Menurut Nasikun (1987:38). Berghe mengemukakan beberapa karakteristik sebagai sifat-sifat dasar dari suatu masyarakat majemuk. *Pertama*, terjadinya segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang seringkali memiliki sub kebudayaan yang berbeda satu sama lain. *Kedua*, memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer. *Ketiga*, kurang mengembangkan konsensus di antara para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar. *Keempat*, secara relatif seringkali mengalami konflik-konflik di antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. *Kelima*, secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan (*coercion*) dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi. Serta *keenam*, adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok-kelompok yang lain.

Gambaran di atas memperlihatkan bahwa salah satu kriteria dalam menetapkan suatu masyarakat itu sebagai masyarakat majemuk, tekanan yang digunakan sebagai patokan adalah bahwa di dalam masyarakat ini harus terdapat beberapa kesatuan sosial yang merupakan bagian dari masyarakat itu dan kesatuan tersebut secara relatif berdiri sendiri-sendiri, maksudnya – dengan meminjam istilah dari wawasan sistem – kesatuan sosial itu sebagai totalitas, yakni memiliki pola-pola perilaku tertentu yang dapat dibedakan dengan pola-pola perilaku dari kesatuan sosial lainnya dalam masyarakat yang bersangkutan (Taneko, 1994:105).

Untuk menyatakan bahwa masyarakat Indonesia terdiri dari satuan-satuan masyarakat, maka para *founding fathers* merumuskan konsep pluralisme ini dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. Dengan demikian, masyarakat Indonesia diwujudkan atas dasar landasan itu, yang secara konseptual merupakan pengakuan akan eksistensi keanekaan dan dengan kecenderungan menunjuk satu bangsa sebagai satuan masyarakatnya.

Bhinneka Tunggal Ika tidak melakukan peleburan, tetapi ditandai dengan penjumlahan etnis (*ethnic arithmetic*) (Soekanto dan Taneko, 1983). Soemardjan menguraikan, bahwa kalau masyarakat diartikan sebagai sejumlah manusia yang hidup

bersama cukup lama sehingga dapat menghasilkan kebudayaan, maka di Indonesia sekarang ada banyak masyarakat. Tiap suku bangsa adalah masyarakat tersendiri. Oleh karena itu, dapat dinyatakan, bahwa salah satu kesatuan sosial yang dimaksudkan dalam pembahasan itu adalah suku bangsa, yang dengan demikian merupakan masyarakat yang relatif berdiri sendiri-sendiri yang berada dalam suatu masyarakat secara keseluruhan, yaitu masyarakat Indonesia.

Menurut Nasikun (1987:30) masih ada faktor lain yang menjadikan Indonesia sebagai masyarakat majemuk. Baginya, struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh dua cirinya yang bersifat unik. Secara horizontal, ia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, perbedaan-perbedaan agama, adat serta perbedaan-perbedaan kedaerahan. Secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan bawah yang cukup tajam. Perbedaan-perbedaan suku bangsa, perbedaan-perbedaan agama, adat dan kedaerahan serta antar seringkali disebut sebagai ciri masyarakat yang bersifat majemuk. Sementara mengutip Kroef, Nasikun (1987:51) menyebutkan bahwa, dimensi vertikal struktur masyarakat Indonesia yang menjadi semakin penting artinya dari

waktu ke waktu, adalah semakin tumbuhnya polarisasi sosial berdasarkan kekuatan politik dan kekayaan.

Dengan begitu, secara umum, kompleksitas masyarakat majemuk tidak hanya ditandai oleh perbedaan-perbedaan horisontal, seperti yang lazim dijumpai pada perbedaan suku, ras, bahasa, adat-istiadat dan agama. Dalam masyarakat majemuk terdapat pula perbedaan vertikal, yakni capaian yang diperoleh melalui prestasi (*achievement*). Indikasi perbedaan-perbedaan tersebut tampak dalam strata sosial ekonomi, posisi politik, tingkat pendidikan, kualitas pekerjaan dan kondisi pemukiman (HB X, 2001: 5).

1. Kemajemukan Etnik

Sukubangsa/etnik (*ethnic group*), adalah sekelompok orang yang dapat dibedakan dari kelompok lain, karena mempunyai perbedaan kebudayaan, yang terutama dapat diketahui dari bahasa yang dipergunakan. Di Indonesia etnik-etnik tersebut misalnya orang-orang Jawa, Sunda, Bali, Batak, Tionghoa, Minang, Melayu, Deli, Betawi, Makasar (Dananjaya, 2001:5).

Sampai kini ada berbagai pendapat mengenai jumlah suku bangsa di Indonesia. Atas dasar patokan jumlah bahasa daerah, maka Esser, Berg dan St. Takdir Alisjahbana memperkirakan adanya 200 sampai 250 suku bangsa di Indonesia, bahkan Jaspian yang pernah menyusun daftar suku

bangsa di Indonesia. berpendapat bahwa jumlah suku bangsa di Indonesia ada sekitar 360 macam. Menurut Koentjaraningrat, jumlah masing-masing suku bangsa di Indonesia ada 195 suku bangsa.

Kendati dipergunakan lebih dari 200 bahasa (Geertz, 1981:1), namun begitu, tidak semua bahasa yang ada di Indonesia itu berbeda-beda. Di sini masih ditemui beberapa yang umum. Sebagian besar bahasa-bahasa yang terdapat sini termasuk ke dalam satu rumpun bahasa, yaitu rumpun bahasa Polynesia Melayu. Ini berarti bahwa semua bahasa itu sama memiliki kata-kata seasal dan mempunyai tata bahasa yang strukturnya amat besar persamaannya.

Nasikun (1987:31) dengan mengutip Furnivall menguraikan bahwa, masyarakat Indonesia pada masa Hindia Belanda, adalah merupakan suatu masyarakat majemuk. Sebagai masyarakat majemuk, masyarakat Indonesia merupakan tipe masyarakat daerah tropis di mana mereka yang berkuasa dan mereka yang dikuasai memiliki perbedaan ras (*race*) (Dananjaya, 2001:3), yaitu sekelompok orang yang dapat dibedakan dari kelompok lain karena mempunyai ciri-ciri ketubuhan yang berbeda, antara lain warna kulit, warna rambut, bentuk bibir, tinggi tubuh dan bentuk tengkorak. Di dunia ini ada 3 ras besar yaitu Kaukasoid, Mongoloid dan Negroid serta beberapa ras kecil, di antaranya Australoid dan Hontetot.

Orang-orang Belanda sebagai golongan minoritas, kendati jumlahnya semakin bertambah-tambah terutama pada akhir abad XIX, sekaligus adalah penguasa yang memerintah bagian amat besar orang-orang Indonesia pribumi yang menjadi warga negara kelas tiga di negerinya sendiri. Golongan orang-orang Tionghoa, sebagai golongan terbesar di antara orang-orang Timur Asing lainnya, menempati kedudukan menengah di antara kedua golongan tersebut.

Kemajemukan budaya di Indonesia pada masa kini sudah berbeda gambarnya dengan kemajemukan budaya di masa yang lalu (Ahimsa, 7). Dulu, meskipun telah mengalami kontak satu dengan yang lain, dan mungkin pula telah hidup berdampingan dengan suku-suku lain, suku-suku bangsa di Indonesia belum mengalami kontak antar suku yang begitu intensif seperti sekarang.

Selain itu, kelompok-kelompok yang berasal dari suku yang lain masih belum sebanyak sekarang. Dulu belum begitu banyak orang Madura di Kalimantan, belum begitu banyak orang Bugis dan Makasar di Ambon atau di Kupang, belum ada begitu banyak orang Jawa di Papua seperti sekarang. Perubahan komposisi penduduk berdasarkan atas suku bangsa ini berarti juga semakin kompleksnya budaya masyarakat yang ada di suatu tempat. Dalam konteks masyarakat yang bertambah majemuk seperti ini, hal-hal yang semula

disepakati bersama karena masih adanya satu kerangka pemikiran (kebudayaan) yang relatif sama, kini mulai berguguran.

Dengan demikian, masalah yang dihadapi Indonesia masa kini bukanlah terutama soal pengintegrasian keturunan asing, akan tetapi justru masalah pengintegrasian suku-suku bangsa tersebut menjadi bangsa Indonesia (Soekanto, 1993:49).

Hadirnya berbagai macam individu dengan latar belakang budaya yang berbeda membuat kesepakatan kultural yang berasal dari kerangka penafsiran dan pemikiran yang kurang lebih sama kini tidak lagi demikian. Variasi penafsiran atas hal-hal yang terjadi dalam masyarakat semakin banyak yang tinggi, sehingga kesepakatan budaya semakin melonggar. Ini membawa masyarakat pada suatu kondisi sosial yang tidak sangat integratif lagi.

Dengan semakin bervariasi kerangka penafsiran ini dalam masyarakat, maka berbagai konflik dan cara penyelesaiannya kini memperoleh tafsir yang berbeda-beda pula. Akibatnya mudah diduga, yakni penyelesaian perkara yang dianggap adil oleh sekumpulan individu belum tentu dianggap adil oleh sekumpulan individu yang lain.

Di sinilah berbagai cara penyelesaian yang berakar pada adat suatu masyarakat kehilangan arti dan fungsinya untuk menyelesaikan

sengketa yang terjadi. Cara semacam itu umumnya hanya efektif untuk sebuah masyarakat dengan sistem budaya dan sosial yang relatif homogen. Ketika cara tersebut digunakan dalam masyarakat dan kebudayaan yang lebih majemuk, maka dia kehilangan efektivitasnya. Di sinilah kemajemukan budaya berubah menjadi kendala bagi terciptanya integrasi sosial yang lebih kokoh.

2. Kemajemukan Agama

Kenyataan bahwa Indonesia terletak di antara Samudra Indonesia dan Pasific, sangat mempengaruhi terciptanya pluralitas agama di dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena letaknya yang berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan laut melalui kedua samudera tersebut, maka masyarakat Indonesia telah sejak lama sekali memperoleh berbagai-bagai pengaruh kebudayaan bangsa lain melalui para pedagang asing.

Pengaruh yang pertama kali menyentuh masyarakat Indonesia berupa pengaruh kebudayaan Hindu dan Budha dari India sejak 400 tahun Sesudah Masehi. Hinduisme dan Budhaisme, pada waktu itu tersebar meliputi daerah yang cukup luas di Indonesia, serta lebur bersma-sama dengan kebudayaan asli yang telah hidup lebih dulu sebelum itu. Namun demikian terutama di pulau Jawa dan Bali pengaruh agama Hindu dan Budha itu tertanam dengan kuatnya sampai saat ini.

Hasil final dari semua pengaruh kebudayaan tersebut adalah dalam bentuk pluralitas agama di dalam masyarakat Indonesia (Nasikun 1987: 43). Di luar Jawa hasilnya dapat dilihat pada timbulnya golongan Islam modernis terutama di daerah-daerah yang strategis berada di dalam jalur perdagangan internasional pada waktu masuknya reformasi agama Islam, golongan Islam konservatif-tradisionalist di daerah-daerah pedalaman, dan golongan Kristen (Katolik dan Protestan) di daerah-daerah Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Tapanuli dan sedikit di daerah Kalimantan Tengah, serta golongan Hindu Bali (Hindu-Dharma) terutama di pulau Bali. Di pulau Jawa, dapat dijumpai golongan Islam modernis terutama di daerah pantai utara Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan kebudayaan pantainya, serta sebagian besar daerah Jawa Barat; golongan Islam konservatif-tradisionalist di daerah-daerah pedalaman Jawa Tengah dan Jawa Timur; dan golongan Islam nominal yang biasa disebut juga *abangan* terutama di daerah-daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta golongan minoritas Kristen yang tersebar hampir di setiap daerah perkotaan Jawa.

Pembagian masyarakat Jawa yang beragama Islam, dapat digolongkan ke dalam *wong abangan* dan *santri* (Geertz, 1981; Koentjaraningrat, 1984). Baik orang

abangan maupun *santri* terdapat dalam semua lapisan masyarakat orang Jawa. Ada orang *abangan* dan *santri* di antara *wong cilik* di desa maupun di kota; ada orang *abangan* dan *santri* di antara priyayi; dan ada pula orang *abangan* di antara bangsawan. Namun demikian di berbagai daerah di Jawa terutama berpenduduk orang *abangan*, sedangkan lain daerah terutama berpenduduk *santri*.

Agama berperan besar di dalam kehidupan masyarakat, karena agama-agama tersebut digunakan untuk melandasi kekuasaan raja-raja di masa lalu. Hal ini misalnya dapat dilihat ketika raja-raja Syailendra membangun candi-candi Borobudur, Pawon, Mendut dan Kalasan dengan teknologi yang sederhana. Peninggalan sejarah menunjukkan bagaimana hubungan peranan agama dengan kekuasaan dan susunan masyarakat di kepulauan Indonesia pada masa lalu.

Masuknya agama Islam, tidak mengubah hubungan agama dengan kekuasaan. Seperti raja-raja terdahulu, kerajaan-kerajaan Islam sesuai dengan ajaran Islam mempergunakan agama sebagai landasan kekuasaan raja. Akan tetapi perkembangan Islam menumbuhkan pengelompokan baru di kalangan masyarakat Indonesia. Perkembangan agama yang relatif cepat yang disertai oleh pemupukan kekuasaan di sekitar raja-raja Islam kemudian menimbulkan pengelompo-

kan baru di dalam masyarakat, yakni antara Islam dan non Islam, atau antara santri dan abangan (Sanit, 1995:21).

Selama hampir 300 tahun di bawah kekuasaan kolonial Belanda, pandangan masyarakat mengenai hubungan antara kekuasaan dengan agama hampir tidak berubah. Hal ini terjadi karena kekuasaan kolonial Belanda berdiri di atas dua sistem yang sama sekali berbeda. Di satu pihak Belanda membangun sistem kekuasaan sekuler dengan segala aparat birokrasinya, di lain pihak masyarakat dikukuhkan di dalam sistemnya yang semula, di mana perkaitan antara agama dengan organisasi dan sistem kekuasaan di dalam masyarakat begitu erat.

Demikianlah dengan sistem pemerintahan tidak langsung (*indirect rule*) Belanda mengatur wilayah Indonesia melalui kaum aristokrat dan kaum adat yang sudah sejak lama merupakan lapisan atas dari masyarakat Indonesia. Tentu saja kaum aristokrat dan kaum adat tidak hendak mengubah susunan masyarakat yang ada, karena hal itu berarti akan membahayakan kedudukan mereka yang secara formal sudah diperkokoh oleh kekuasaan kolonial Belanda.

Politik Balas Budi (*etische politiek*) yang dijalankan Belanda, ternyata juga memberi kesempatan yang lebih menguntungkan kepada golongan aristokrat dan adat ini.

Pendidikan yang lebih baik menyebabkan mereka lebih mampu mengisi kebutuhan Pemerintah Kolonial Belanda akan tenaga-tenaga administratif. Dengan demikian secara tidak langsung, kekuasaan kolonial Belanda telah membantu golongan aristokrat dan adat dengan ciri kebangsawanan dan birokrat yang oleh Geertz disebut sebagai golongan priyayi.

Di samping itu kekuasaan kolonial Belanda dengan politik Balas Budinya telah mendorong terbentuknya semacam penggolongan lain di dalam masyarakat Indonesia, terutama di kalangan elit, yakni antara kelompok yang asyik mengagumi teknologi dan peradaban Barat dan kalangan yang mendambakan keaslian timur Indonesia.

Terdapat dua kelompok elit dalam negara dan masyarakat menyangkut bagaimana negara dan masyarakat Indonesia diorganisir dan digerakkan untuk mencapai taraf perkembangan masyarakat yang maju. *Pertama*, mereka yang menghendaki penggunaan teknologi dan sistem politik yang telah berhasil diterapkan di negara-negara Eropa dan Amerika. Dan *kedua*, mereka yang beranggapan bahwa pengembangan masyarakat Indonesia hendaklah dicapai dengan lembaga-lembaga tradisional.

Berbagai aliran dan golongan di atas, mempengaruhi kehidupan organisasi sosial dan politik. Pembentukan organisasi sosial seperti

Syarikat Dagang Islam (SDI), Nahdathul Ulama (NU) (sebelum menjadi partai politik) dan Muhammadiyah, sungguhpun merupakan lembaga-lembaga yang memelopori pengorganisasian masyarakat Indonesia secara luas dan modern, namun pada masa pembentukannya, organisasi-organisasi tersebut lebih dimaksudkan untuk menentang tuntutan-tuntutan sosial dari golongan tertentu di dalam masyarakat. SDI, NU dan Muhammadiyah misalnya, lebih bermaksud mewakili kepentingan mereka yang beragama Islam.

Ketika disadari bahwa masalah yang dihadapi masyarakat Indonesia bukan sekedar perbaikan keadaan sosial ekonomi, maka organisasi-organisasi tersebut memperluas perjuangan untuk menuntut kebebasan politis dari kekuasaan kolonial Belanda dengan mengalihkan pada pergerakan politik. Ketidakpuasan muncul ketika kalangan elit lama telah tergeser ke lapisan yang lebih rendah, golongan menengah makin berkurang perannya ekonominya, serta ketidakpuasan yang dialami oleh mereka yang telah memperoleh pendidikan Barat.

Selanjutnya lahir organisasi politik misalnya SI (1912) dan PSI (1926).

Ketidakadilan dan keinginan untuk merdeka merupakan unsur utama yang melandasi organisasi-organisasi pergerakan itu. Tuntutan-tuntutan tersebut bisa diterapkan ke dalam

pemikiran yang mengikat kelompok-kelompok dalam masyarakat dengan berbagai cara. Misalnya SI, PSI dan NU, menggunakan ajaran-ajaran agama Islam untuk menjadi dasar bagi tuntutan untuk merdeka.

Setelah kemerdekaan, Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP) menetapkan membentuk partai politik atas dasar konsep banyak partai (*multy party*) agar berbagai aspirasi masyarakat dapat tersalur dengan baik. Organisasi sosial dan partai politik yang sudah terbentuk sejak jaman Belanda merespon secara positif, hingga terbentuk berbagai partai politik, termasuk Majelis Sjiro Muslimin Indonesia (MASYUMI).

Pengaruh ikatan primordial seperti agama terhadap pengorganisasian partai-partai masih jelas sekali seperti organisasi-organisasi perjuangan kemerdekaan dan partai-partai sebelum kemerdekaan. Pengaruh ini semakin kentara dalam usaha partai-partai untuk memperoleh dukungan masyarakat dalam pemilu pertama di Indonesia. Pada masa ini dapat dibedakan antara partai orang santri, abangan dan priyayi, dilihat dari agama dan kebudayaan kelompok masyarakat pendukungnya. Misalnya MASYUMI, NU dan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Tarbiyah Islamiah (PERTI) didukung oleh kalangan santri, Partai Komunis Indonesia (PKI) terutama didukung oleh kaum abangan, sedang priyayi

lebih banyak yang mendukung Partai Nasionalis Indonesia (PNI).

Ketika Soeharto, yang juga berasal dari abangan, berkuasa nampak bagaimana melihat hubungan Islam dan politik. Jumlah partai kemudian dibatasi, hingga akhirnya hanya ada satu partai yaitu Golongan Karya (Golkar) yang berkuasa. Akibatnya, tidak ada jalan lain bagi mereka yang ingin berkarir tinggi dalam politik, selain masuk Golkar atau birokrasi, termasuk mereka yang berlatar belakang santri dan partai-partai Islam lainnya.

Pemilu pertama setelah berakhirnya Orde Baru yang jauh lebih bebas menunjukkan bahwa, mereka yang semula berada di Golkar tetap di sana, yang tidak kemudian bergabung dengan Partai Persatuan Indonesia (PPP) yang berasas Islam, dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang berasas Pancasila, membentuk partai baru berasas Islam Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan (PK) dan partai baru yang bukan berasas Islam Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Hasil pemilu menunjukkan bahwa partai berasas Islam hanya berhasil mengumpulkan 14% dari jumlah total pemilih, yang bila dibandingkan dengan perolehan suara partai Islam dalam pemilu 1955 berarti 30% lebih kecil.

3. Sistem Ekonomi Ganda

Kenyataan akan munculnya dualisme sosial di Indonesia, telah

diduga sejak jaman kolonial. Dalam sistem sosial dan ekonomi yang dualistis ini terdapat karakteristik keterpisahan dari satu sistem menjadi dua bagian (tredisional – modern), yang berinteraksi secara tidak seimbang dan kompleks sifatnya (Rachbini dan Hamid, 1994:18).

Menurut Boeke, ketika muncul dua atau lebih sistem sosial yang berbeda di mana satu dengan lainnya dan satu di antaranya mendominasi yang lain, maka di sini hadir sistem yang dualistis dan pluralistis. Dalam masyarakat yang dualistis, salah satu sistem sosialnya berasal dari luar (*imported*) dan memperoleh eksistensi dalam lingkungan yang baru tanpa proses asimilasi yang memadai dengan sistem sosial divergen yang telah tumbuh di sana. Hasilnya menjadi tidak umum untuk konteks masyarakat secara keseluruhan. Kebanyakan sistem sosial yang dualistis ditemukan dari penetrasi sistem pra-kapitalisme masyarakat agraris, di mana sistem sosial yang asli memegang nilainya sendiri sehingga sulit menyerap prinsip-prinsip kapitalisme dan menempatkannya dalam praktek yang seutuhnya (Rachbini, 18).

Menurut Ranis (1984:39) pemakaian kerangka teori dualisme ekonomi sangat relevan dengan negara-negara sedang berkembang di Asia, termasuk Indonesia dengan pengecualian Hongkong dan Singapura. Meskipun tidak dikatakan bahwa dualisme ekonomi merupakan

karakteristik dari seluruh negara-negara di Asia, tetapi kebanyakan negara di kawasan ini, khususnya bagian selatan dan tenggara, tengah menghadapi kondisi yang dualistis di dalam kegiatan ekonomi mereka.

Interaksi antara dua bagian dalam satu sistem tersebut menarik perhatian Ranis, khususnya dalam kaitannya dengan perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri. Untuk melihat interaksi tersebut, Ranis menengahkan tiga variabel yang dapat menerangkan, yakni: produktivitas rata-rata tenaga kerja di sektor pertanian (sektor tradisional), konsumsi perkapita, dan proporsi total populasi yang tidak lagi bekerja di sektor pertanian. Produktivitas rata-rata tenaga kerja, misalnya, dinilai dapat meningkat jika terjadi perubahan teknologi yang berkaitan dengan pertumbuhan penduduk. Proporsi tenaga kerja di sektor tradisional akan berkurang melalui cara ini karena mengisi sektor-sektor yang produktif di luar sektor tradisional.

Berbeda dengan Boeke, Ranis memandang dualisme ekonomi sebagai sebuah kontinum karena sektor modern mempunyai hubungan dengan sektor tradisional. Pandangan seperti ini mengacu pada pengalaman di negara-negara maju di mana perubahan struktur ekonomi dari tradisional ke modern merupakan suatu perjalanan yang historis.

Analisis tentang dualisme di negara sedang berkembang seperti ini

dan cenderung dilupakan adalah prestasi sektor formal dalam menyerap tenaga kerja yang tidak memadai sebagai penyangga sistem secara keseluruhan. Sektor formal di Indonesia, seperti juga dialami oleh negara berkembang lainnya, hanya mampu menopang sebagian kecil unsur di dalam sistem. Sektor formal ini saja sebagai segmen yang disentuh, yang mendapat peluang berkembang sangat pesat. Sementara itu sebagian besar segmen lainnya mengalami stagnasi dan kelambanan.

Satu hal yang tidak diduga oleh Ranis adalah bahwa tenaga kerja yang berlebih (*surplus of labor*) sudah sedemikian besar sehingga berkembang menjadi sektor informal karena sektor formal tidak mempunyai kapasitas yang cukup untuk menyerapnya. Persoalan dalam sektor informal itu sendiri menjadi semakin rumit, sementara itu perkembangan sektor formal semakin mapan karena harus mengimbangi perkembangan-perkembangan yang pesat di luarnya. Akibatnya, keterkaitan di antara keduanya menjadi tidak fungsional (Rachbini, 20).

Mynt (1985:24-42) membedakan sektor modern dengan tradisional dalam karakteristik sebagai berikut. *Pertama*, unit-unit ekonomi dalam sektor modern sangat terspesialisasi dan terintegrasi penuh. Sebaliknya, unit-unit ekonomi pada sektor tradisional mempunyai derajat spesialisasi yang rendah, misalnya

model produksi subsisten di sektor pertanian maupun sektor informal perkotaan. *Kedua*, sektor modern mencakup usaha-usaha besar yang padat modal dengan teknologi yang modern, sementara sektor tradisional menampung para petani dan perajin yang bekerja atas dasar teknologi tradisional. *Ketiga*, usaha bisnis di sektor modern mempekerjakan tenaga kerja atas dasar regular dan membayar mereka atas dasar produktivitas marjinal. Sedangkan sektor tradisional menyerap tenaga kerja dari lingkungan keluarga dan dibayar seadanya atas dasar produktivitas rata-ratanya. *Keempat*, unit ekonomi di sektor modern mempunyai akses terhadap lembaga-lembaga keuangan, bahkan dapat memperoleh pinjaman dengan bunga relatif rendah. Sementara itu merke yang bekerja di sektor tradisional mempunyai akses yang sedikit terhadap lembaga keuangan formal, bahkan mereka terjat bungan tinggi dari lembaga keuangan liar.

Sementara itu, Todaro (1982: 92-94) menerangkan eksistensi dualisme dengan unsur-unsur, sebagai berikut. *Pertama*, dualisme merupakan kondisi tatanan yang berbeda di mana yang kuat dan yang lemah dapat saling terkait keberadaannya dalam ruang dan waktu yang sama. *Kedua*, koeksistensi ke dua tatanan tersebut bersifat kronis dan bukan merupakan

tanda adanya transisi. Keadaan ini bukan merupakan suatu fenomena sementara yang akan hilang karena waktu. Kesenjangan antara yang kuat dan yang lemah cenderung langgeng karena tatanan dan kelembagaan masing-masing yang berbeda. *Ketiga*, derajat kesenjangan superioritas dan inferioritas terbukti tidak semakin rendah, bahkan ada tendensi kesenjangan yang cenderung meningkat. Dan *keempat*, interrelasi antara unsur yang kuat dan yang lemah tidak membuat yang kuat mampu menarik yang lemah. Dalam kenyataan, perkembangan yang kuat justru menekan perkembangan yang lemah.

Penutup

Masyarakat majemuk tidak pernah menghasilkan tatanan kehidupan yang egalitarian dan demokratis, melainkan berpotensi otoriter dan despotis, karena corak etniknya yang beraneka ragam, dari feodalistis dan petarnalistis sampai etnosentris (HB X, 8).

Masyarakat majemuk yang menekankan keanekaragaman etnik sepatutnya dikaji untuk digeser pada multikulturalisme (Kymlicka, 2002) yang tidak hanya mencakup kebudayaan etnik, tetapi juga berbagai kebudayaan lokal yang meletakkan berbagai budaya itu dalam kesetaraan derajat. Sehingga tidak ada lagi jenjang sosial berdasarkan etnik.

DAFTAR BACAAN :

Buku

- Boeke, JH. 1982. "Memperkenalkan Teori Ekonomi Ganda". *Dalam Sajogyo. Bunga Rampai Perekonomian Desa*. Yayasan Obor Indonesia dan IPB. Jakarta.
- Geertz, Hildred. 1981. *Aneka Budaya dan Komunitas di Indonesia*. YIIS dan FIS UI. Jakarta.
- Ibrahim, Jabal Tarik. 2003. *Sosiologi Pedesaan*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Kymlicka, Will. 2002. *Kewargaan Multikultural*. LP3ES. Jakarta.
- Koentjaraningrat. 1984. *Celapar: Sebuah Desa di Jawa Tengah Bagian Selatan. Dalam Koentjaraningrat. Masyarakat Desa di Indonesia*. LPFE UI. Jakarta.
- Nasikun. 1987. *Sistem Sosial Indonesia*. CV Rajawali. Jakarta.
- Rachbini, Didik J & Abdul Hamid. 1994. *Ekonomi Informal Prkotaan*. LP3ES. Jakarta.
- Sadli, M. 1982. *Beberapa Pandangan atas Teori Ekonomi Ganda Boeke. Dalam Sajogyo. Bunga Rampai Perekonomian Desa*. Yayasan Obor Indonesia dan IPB. Jakarta.
- Sanit, Arbi. 1995. *Sistem Politik Indonesia, Kestabilan, Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1993. *Beberapa Teori Sosiologi tentang Struktur Masyarakat*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Taneko, Soleman B. 1994. *Sistem Sosial Indonesia*. CV Fajar Agung. Jakarta.

Dokumen & Harian

- Abdillah, Masykuri. 1999. "Pluralisme dan Toleransi." *Dalam Kompas*, 8 April.
- Ahimsa-Putra, Heddy Shri, 2001. Dari Mosaik Budaya ke Permadani Budaya: Pluralitas Budaya, Penyelesaian Sengketa dan Perubahan Masyarakat Pedesaan di Indonesia. Makalah *dalam* seminar Menuju Indonesia Baru: Dari Masyarakat Majemuk ke Masyarakat Multikultural. PIB dan AAI, Yogyakarta, 16 Agustus.
- Chang, William. 1999. "Sara sebagai Modal Pembangunan Bangsa". *Dalam Kompas*, 14 Desember.